

DETERMINAN AKSESIBILITAS DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anim Wiyana¹ dan Anna Sutrisna S²

¹STIEM Bongaya Makassar

²Politeknik Negeri Ujung Pandang

email: nanna_koko@yahoo.com

Abstract

This research aims to test influence the accessibility and Presentation of Financial Statements Against Regions Financial Management accountability either together (simultaneously) or individually (partial). Collecting data using primary data obtained from the questionnaire using nonprobability sampling technique (saturated sample). The population in this study is a Member of Parliament of Makassar , Makassar City Auditor Inspectorate , NGO officials in Laskar Merah Putih and the Institute for Social Economic and Political Issues, while samples taken amounted to 80 respondents . The analytical method used in this research is multiple linear regression. The research proves that the presentation of the Regional Financial Statements and accessibility both partially and simultaneously influence the Financial Management Accountability in Government of Makassar .

Keywords: *Regional Financial Statements , Accessibility, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Di era sebelum reformasi, kebijakan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah sudah dikenal konsep pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur penyusunan laporan pertanggungjawaban. Transparansi penyusunan anggaran masih minim karena hanya melibatkan pihak DPRD. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala daerah dibahas dengan DPRD, walaupun tidak dibuka secara luas kepada publik. Pengukuran kinerja baru sebatas target ukuran perbandingan anggaran dengan realisasinya (penyerapan anggaran), perbandingan antara standar biaya dan realisasinya (efisiensi anggaran), target dan persentase fisik proyek. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan belum melihat bahwa akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan. Namun demikian, hal itu bisa kaitkan dengan pengelolaan keuangan Negara yang sangat sentralistik dimana porsi alokasi anggaran negara untuk pemerintah daerah sangat minim dan relatif stagnan (Djalil 2014:41)

Pada era reformasi muncul semangat otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat kepada daerah. Salah satu implikasi pendelegasian kewenangan tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat-Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.

Menurut Prajogo (2001) dalam Halim dan Iqbal (2012:35) Pemerintah yang baik atau *good governance* antara lain ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah (Halim dan Iqbal 2012:44). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim 2007:330). Menurut Bastian (2010 : 297) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectivites of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintahan. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

...Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a "right to know", a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in the democratic society (par. 56).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. *Concepts Statement No. 1* menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo 2009 : 162)

Menurut Mulyana (2006) dalam Sanjaya dkk (2014) Pemerintah harus meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Namun kenyataannya, pemerintah tidak menyediakan informasi tersebut secara terbuka melalui media baik surat kabar maupun *website* kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik dan pembayar pajak. Dalam hal ini, sulitnya mengakses laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Makassar. Situs resmi yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar masih belum menampilkan Laporan Keuangan Daerah yang harusnya terpublikasi pada situs resmi tersebut. Dimana salah satu media yang paling mudah untuk merealisasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah *website* yang dapat diakses melalui jaringan internet. Selain itu, *website* Kemendagri telah menampilkan satu *site* untuk memfasilitasi transparansi keuangan daerah, namun para pemda belum melakukan *update* data yang dipublikasi pada *site* tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, selaku lembaga eksekutif, telah mencoba menerapkan transparansi dalam menginformasikan pengelolaan keuangan daerah melalui *website*. Akan tetapi informasi yang ditampilkan bersifat umum dan normatif sedangkan informasi yang bersifat rinci seperti anggaran dan realisasi belanja per kegiatan maupun per proyek yang sedang dilakukan cenderung belum ditampilkan dengan komperhensif. Adapun dokumen terkait belanja yang sering ditampilkan hanya berupa pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa (Djalil 2014:399). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas keuangan daerah, dimana Pemerintah Kota Makassar gagal meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sulsel. Pada tahun 2014 Pemkot Makassar kembali menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih menyisahkan berbagai persoalan seperti adanya 8 temuan kelemahan pengendalian internal dan 13 temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hal tersebut terkuak saat BPK Wilayah Sulsel menyerahkan hasil laporan pemeriksaan keuangan (LHP) ke walikota Makassar.

Untuk lebih mendorong dan memudahkan para Pemerintah Daerah mewujudkan transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang informasi-informasi yang wajib ditampilkan dalam *website* Pemerintah Daerah. Selain itu, *website* resmi Kemendagri memiliki daftar tautan/link ke *website* para *stakeholders* dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan suatu Pemerintah Daerah maupun membandingkan pengelolaan keuangan antar pemerintah daerah. Menurut Jones et al. (1985) dalam Bandariy (2010), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel berimbas pada ketertarikan pengguna informasi daerah untuk memanfaatkan informasi yang ada secara optimal.

Salah satu penelitian yang dilakukan Aliyah dan Nahar (2012) yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: 1) Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan 3) Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Uraian Latar Belakang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai apakah aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Keuangan Daerah

Halim (2007:23) menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lainlain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Seperti keuangan Negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD (Halim 2007:25).

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang (Halim 2007:37).

2.2 Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Sanjaya dkk (2014) mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*) (Mardiasmo 2009:171). Sagala (2011) menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Dari pemaparan teori di atas dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis H_1 penelitian ini adalah:

H_1 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 alinea 10 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Paragraf 17 dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah mengandung informasi yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode yang dilaporkan setiap tahun. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja pemerintah bagi para penggunanya (Saputra 2012). Menurut Diamond (2002) dalam Aliyah dan Nahar (2012) Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggungjawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada asset dan utang yang mereka kelola.
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pada *Impossibility Theory* menurut Deniski (1973) dalam Bandariy (2010), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan, oleh karena itu sistem akuntansi pemerintah harus:

- a. Menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai dengan GAAP.
- b. Menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam paragraf 16 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, Pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investas, dan pinjaman, dan Pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
- b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

- c. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari pemaparan teori di atas dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis H_2 penelitian ini adalah:

H_2 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Djalil 2014:408). Nasution (2009) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas dua macam yaitu (Mardiasmo 2009:21): Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas).

Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara financial. Oleh, sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanan. Dengan pengertian yang lebih luas, akuntabilitas berarti pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada publik. Dalam suatu struktur pemerintah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan (Halim dan Iqbal 2012:20). Djalil (2014:408) Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- 3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah.
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan antara lain (Halim dan Iqbal 2012:83):

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi akuntabel.
- 2) Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara “konsisten” dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Jujur, obyektif, transparan

Halim dan Iqbal (2012:24) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, berisi:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada (Halim dan Iqbal 2012:36). Halim dan Iqbal (2012:59) mengemukakan pelaksanaan otonomi daerah berbarengan dengan gencarnya tuntutan publik akan pelaksanaan pemerintahan yang baik “*good governance*” dan membawa implikasi pada reorientasi manajemen keuangan daerah. Paling tidak ada tiga alasan mengapa reorientasi di bidang pengelolaan keuangan daerah diperlukan.

- 1) Perlimpahan berbagai wewenang dan urusan mengakibatkan manajemen keuangan daerah yang dilaksanakan selama ini terbukti kurang dapat mendukung terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu, misi pengelolaan keuangan daerah harus menekankan pada tiga aspek pelayanan masyarakat, yaitu pelayanan administrasi, kebutuhan dasar, dan infrastruktur. Penekanan itu tidak hanya pada besarnya proporsi alokasi anggaran, tetapi luasnya manfaat dan besarnya partisipasi masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah harus didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (kinerja yang baik).
- 3) Manajemen keuangan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) secara transparan.

Dari pemaparan teori di atas dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis H₃ penelitian ini adalah:

H₃: Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan daerah pemerintah kota Makassar, yaitu Anggota DPRD Kota Makassar sebanyak 50 orang, Auditor Inspektorat Kota Makassar sebanyak 20 orang, Lembaga Swadaya Masyarakat di Makassar seperti: pengurus Laskar Merah Putih sebanyak 5 orang dan pengurus Institute For Social and Political Economic Issues (ISPEI) sebanyak 5 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, yaitu memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-Ragu), 2 (TS= Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Table 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Butir pernyataan
Variabel Independen				
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X ₁)	Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (PP No. 71 Tahun 2010).	1. Relevan	Ordinal	1 – 2
		2. Andal		3 – 4
		3. Dapat dibandingkan		5 – 6
		4. Dapat dipahami		7 – 8
Aksesibilitas Laporan	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan	1. Publikasi	Ordinal	1

Keuangan Daerah (X ₂)	kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Marjuki Sagala (2011)	2. Akses		2 – 3
Variabel Dependen				
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Saufi Iqbal Nasution (2009)	1. Integritas Keuangan 2. Pengungkapan 3. ketaatan	Ordinal	1 2 3

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode statistik analisis regresi linear berganda yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Formulasi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X₁ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
X₂ : Penyajian Laporan Keuangan Daerah
a : Konstanta
bx : Koefisien regresi
e : *error*

Pengujian yang dilakukan dalam model regresi linear berganda meliputi Uji Instrumen: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik: Uji normalitas dan Uji Multikolinieritas. pengujian hipotesis 1 dan 2 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi individual (Uji t) dan pengujian hipotesis 3 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi simultan (Uji F).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Statistik Deskriptif

Peneliti mengambil tempat penelitian pada DPRD Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, dan LSM (Laskar Merah Putih dan ISPEI). Kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 51 kuesioner. Kuesioner yang kembali semuanya dapat diolah berjumlah 51 kuesioner.

Hasil statistik deskriptif variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah menyajikan sebanyak 65% responden menyatakan laporan keuangan kota makassar telah terpublikasi secara terbuka melalui media massa dan dapat diakses melalui internet. Pada variable penyajian laporan keuangan daerah sebanyak 81% responden menyatakan bahwa laporan keuangan kota Makassar telah memenuhi unsur-unsur laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk variable dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mayoritas jawaban responden (94%) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, prinsip pengungkapan dan ketaatan.

4.1.2 Hasil Uji Instrument

Pengujian validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrument penelitian. Hasil pengujian menunjukkan tingkat validitas dari instrument yang digunakan bagus. Nilai r_{hitung} semua item pernyataan lebih besar 0,3. Dengan demikianseluruh item pernyataan atau sebanyak 14 pernyataan dinyatakan valid. Hasil dari pengujian reliabel data untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach's* diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrument pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Normal Probability Plot (P-Plot)*, model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penyebaran data (titik-titik) disekitar garis regresi (garis diagonal). untuk menguji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. nilai *tolerance* disetiap variabel independen berada dikisaran 0-1, begitupun dengan nilai VIF disetiap variabel independen <10, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas, sehingga salah satu syarat uji regresi berganda telah terpenuhi.

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama dan kedua digunakan uji t untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil Uji t nilai $df = n - k - 1 = 51 - 2 - 1 = 48$ maka t_{tabel} diperoleh 2,011, nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,745 > 2,011$ maka H_0 ditolak H_a diterima berarti secara parsial, variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $2,336 > 2,011$ maka H_1 dan H_2 diterima.

Pada hipotesis ketiga digunakan uji statistik F. dari hasil pengujian diperoleh F_{hitung} sebesar 14,537 dengan tingkat signifikansi 0,00 dan nilai $df_1 =$ jumlah variabel bebas $- 1 = 2 - 1 = 1$ dan $df_2 = (n - k - 1)$ atau $51 - 2 - 1 = 48$, hasil diperoleh dari lampiran X untuk F_{tabel} sebesar 3,190. Pada tabel 4.12 nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $14,537 > 3,190$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Daerah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil regresi linear berganda dari penelitian ini bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis ini diterima, sehingga secara parsial Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dapat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Walaupun variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat terbatas, dapat dilihat dari Uji Koefisien Determinasi pada nilai *Adjusted R²* sebesar 0,351 atau 35,1%. Meskipun demikian, hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah maka semakin tinggi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2011), Bandariy (2010), dan Aliyah dan Nahar (2012) yang menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada hipotesis kedua diperoleh hasil regresi linear berganda dari penelitian ini bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaruh yang timbul adalah positif signifikan. Hipotesis menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis ini diterima, sehingga secara parsial Penyajian laporan keuangan daerah dapat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Walaupun variabel penyajian laporan keuangan daerah dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat terbatas, dapat dilihat dari Uji Koefisien Determinasi pada nilai *R Square* sebesar 0,377 atau 37,7%. Meskipun demikian, hal ini

mengartikan bahwa semakin tinggi kualitas penyajian laporan keuangan daerah maka semakin tinggi juga Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2010), Bandariy (2010), dan Saputra (2012) yang menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada hipotesis ketiga diperoleh hasil regresi linear berganda dari penelitian ini bahwa Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis menyatakan bahwa Aksesibilitas dan Penyajian secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis ini diterima. Hal ini mengartikan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan dalam mengakses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh aliyah dan Nahar (2012) dan Bandariy (2010) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Saran kepada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya lebih memperluas lagi sampel penelitian. Terutama untuk sampel yang mewakili masyarakat, diharapkan tidak hanya LSM saja yang menjadi sampel penelitian, misalnya dari pihak pers atau lembaga-lembaga keuangan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti, variabel Pemahaman dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. Adapula saran kepada Pemerintah Kota Makassar yaitu:
 1. Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah di pemerintah kota Makassar diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
 2. Diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media dan website resmi milik Pemerintah Kota Makassar (www.makassarcity.go.id) sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas yang efektif.

6. REFERENSI

- [1] Aliyah, Siti dan Aida Nahar, 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 08 No. 02 Tahun 2012.
- [2] Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [3] Bandariy, Himmah, 2010. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- [4] Djalil, Rizal, 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*, RMBooks, Jakarta.
- [5] Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad, 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- [6] Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- [7] Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- [8] Nasution, Saufi Iqbal, 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [9] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- [10] _____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- [11] Sagala, Marjuki, 2011, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- [12] Sanjaya, Dewa Nyoman Krisna Putra Sanjaya, dkk. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah*. Jurnal Ekonomi, Volume 2 No. 1 Tahun 2014.
- [13] Saputra, Ardi Rahmawan, 2012. *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- [14] Sukhemi, 2010. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- [15] _____, 2011. *Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- [16] Sunyoto, Danang, 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*, PT. Refika Adiatma, Bandung.